



LUNCURKAN DASHBOARD MONITORING BERBASIS DATA

Pajak Dominasi Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta

YOGYA (KR) - Pajak daerah masih menjadi sektor paling dominan atas pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Yogyakarta. Guna menjamin transparansi serta menggenjot pendapatan, Pemkot Yogyakarta meluncurkan purwarupa (prototype) Dashboard Monitoring APBD.

Langkah tersebut sebagai strategi krusial untuk mengoptimalkan potensi PAD. Inovasi ini dirancang untuk memperkuat tata kelola fiskal berbasis data secara terintegrasi melalui kolaborasi intensif antar organisasi perangkat daerah (OPD). Sehingga dapat memastikan seti-

ap potensi penerimaan daerah dapat tergali secara maksimal dan efisien.

Walikota Yogyakarta Hasto Wardoyo, menegaskan peningkatan penerimaan daerah tidak bisa lagi dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan strategi yang terintegrasi dan transparan. "Monitoring APBD dan kolaborasi peningkatan PAD ini penting. Tanpa strategi yang sistematis, peningkatan pendapatan daerah tidak akan optimal," ujarnya.

Hasto menjelaskan bahwa karakteristik perekonomian Kota Yogyakarta sangat bergantung

pada dinamika aktivitas ekonomi masyarakat dan ekosistem ekonomi kreatif. Menurutnya, pemerintah daerah harus mempermudah izin serta pelayanan publik agar roda perekonomian terus berputar cepat. "Kalau pelayanan kepada penyelenggara event semakin baik, ekosistem ekonomi kreatif akan tumbuh dan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah," imbuhnya.

Guna memastikan percepatan target penerimaan tersebut, Hasto pun meminta seluruh jajaran OPD untuk bertindak proaktif dalam memetakan serta menggali setiap potensi retribusi

dan pajak daerah. "Saya ingin semua peluang dimanfaatkan. Digitalisasi pelayanan dan manajemen fiskal harus menjadi quick win agar tata kelola keuangan semakin akuntabel dan pelayanan kepada masyarakat semakin mudah," urainya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta Raden Roro Andarini, menyampaikan dashboard monitoring APBD ini diposisikan sebagai alat bantu utama pimpinan dalam memantau pundi-pundi penerimaan daerah secara akurat.

"Dashboard ini diharapkan

menjadi instrumen bagi pimpinan daerah dan seluruh OPD dalam memantau pelaksanaan APBD serta mengambil keputusan manajerial secara cepat dan akurat," ujarnya.

Andarini mengungkapkan bahwa fokus utama dashboard pada tahap awal ini memang ditujukan khusus untuk mengawal kinerja penerimaan PAD sebelum nantinya dikembangkan ke sektor belanja. Pemantauan ketat ini terbukti krusial mengingat sektor pajak daerah menjadi penyumbang terbesar, yakni mencapai Rp 707,52 miliar atau 69,2 persen dari total capaian PAD tahun

2025 yang berhasil menembus Rp 1,02 triliun atau 107,32 persen dari target.

Melalui integrasi data bersumber dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Jogja Smart Service (JSS), dan Satu Data, instrumen digital ini diyakini mampu menjaga tren positif penerimaan daerah. Hingga 27 Juli 2026, realisasi PAD Kota Yogyakarta tercatat telah mengantongi Rp 579,28 miliar atau 58,53 persen dari target tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 989,69 miliar, yang diharapkan dapat terus melampaui target hingga akhir tahun. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPKAD			

Yogyakarta, 21 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005